



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR 900/62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG NOMOR 900/18
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/702/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak September 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG,

ttt

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 NOMOR 900/62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG NOMOR 900/18 TAHUN 2023 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BIRO	Nama	Kode			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	NIP	Prog	Keg	Sub keg	
	Jabatan				
1	2	3	4	5	6
BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	KASUBBAG KEUANGAN	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	KASUBBAG SARANA DAN PRASARANA	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		01	1.07	05	Pengadaan Mebel
		01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya

KASUBBAG PELAYANAN RUMAH TANGGA	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel
	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	KABAG TU DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	01	1.06	10
01		1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01		1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01		1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01		1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01		1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
01		1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
01		1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
01		1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan
KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

		01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
		01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Analisis Kebijakan Ahli madya	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
	SARWORINI, SP, MSi 19660718 199401 2 002 Analisis Kebijakan Ahli madya	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	BAGUS RACHMOYOJATI, S.Pt 19750523 200312 1 003 Analisis Kebijakan Ahli madya	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA 19710909 199603 1 006 Analisis Kebijakan Ahli madya	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
		08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
	Dra. ENY ROKHISAH, M.Kes 19660928 199303 2 005 Analisis Kebijakan Ahli madya	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM 19730106 199903 1 010 Analisis Kebijakan Ahli madya	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	ZRP.TJ. MULYONO, SH, MH 19670922 198903 1 004 Analisis Hukum Ahli Madya	05	1.02	01
05			1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
SRI WAHYUNINGSIH, SH 19691007 199401 2 001 Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

		05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
	HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH 19671022 199303 1 006 Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
		05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
		05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
		01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	MUKHAMAD YUSUF, S.Ag MM 19660505 199203 1 014 Analisis Kebijakan Ahli madya	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si 19690214 199703 1 004 Analisis Kebijakan Ahli madya	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
		04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
		04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
	WORO BOEDISAYEKTI, S.Sos,M.Si 19671024 198803 2 007 Analisis Kebijakan Ahli madya	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
		04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	Drs. AHMAD ABADI, Msi 19641006 199503 1 002 Analisis Kebijakan Ahli madya	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
		02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan
	Drs. JUWANDI, M.Si 19690419 199001 1 001 Analisis Kebijakan Ahli madya	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

		02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
	AGUSTINUS AGUS SUDARMANTO,S.STP, MM 19760812 199703 1 003 Analisis Kebijakan Ahli madya	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	Drs. HARIYONO BAMBANGSATRIYA, M.Si 19641124 198903 1 010 Analisis Kebijakan Ahli madya	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
		03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
		03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah
	Ir. BETTY WULANDARI, M.P 19680925 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli madya	03	1.02	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
		03	1.02	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
		03	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM 19700416 199009 1 001 Analisis Kebijakan Ahli madya	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
		03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	JULY EMMYLIA, SE, MM 19720713 199703 2 005	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	AGUS PRASUTIO, SH,M.Si 19690726 199003 1 002 Analisis Kebijakan Ahli madya	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
		06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
		06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan
		06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

		06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan
	ENY HARYANTI, S.PD, M.Pd 19640909 198812 2 001 Analisis Kebijakan Ahli madya	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M. Kom 19680328 199703 1 002 Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
		07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
		07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
	MUFTI AGUNG WIBOWO, S. Kom, MIT 19731117 199803 1 007 Kabag Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
		07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
		07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
	SUDIRMAN, SH, MM 19680110 199403 1 005 Analisis Kebijakan Ahli madya	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
		07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
		07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO